

Dari Kepustakawanan Struktural ke Kultural: Mengubah Arah dan Paradigma Kepustakawanan Indonesia

Agus Rifai

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

agus.rifai@uinjkt.ac.id

DOI:

© 2024 The Author(s). Published by (Institution). This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstrak

Perubahan lanskap informasi akibat digitalisasi, kecerdasan buatan, dan dinamika masyarakat berbasis pengetahuan menuntut perpustakaan mereposisi perannya dari sekadar penyedia layanan administratif menuju institusi sosial yang lebih partisipatif. Artikel ini bertujuan menganalisis pergeseran paradigma kepustakawanan dari pendekatan struktural menuju pendekatan kultural dalam konteks perkembangan perpustakaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian konseptual melalui analisis literatur terhadap berbagai karya teoretis dalam bidang kepustakawanan dan ilmu sosial, khususnya pemikiran Lankes tentang *new librarianship*, teori strukturasi Giddens, analisis institusional Foucault, serta konsep *third place* dari Oldenburg. Analisis dilakukan melalui interpretasi konseptual dan sintesis teoretis untuk memahami hubungan antara struktur institusi perpustakaan dan praktik sosial pustakawan dalam memfasilitasi produksi pengetahuan di masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa dominasi pendekatan struktural yang berorientasi pada tata kelola administratif berpotensi membatasi peran perpustakaan dalam merespons kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Sebaliknya, paradigma kepustakawanan kultural menawarkan orientasi yang lebih relevan dengan menempatkan perpustakaan sebagai ruang publik yang mendorong dialog pengetahuan, partisipasi komunitas, dan penguatan literasi kritis. Artikel ini menyimpulkan bahwa masa depan kepustakawanan Indonesia bergantung pada kemampuan profesi pustakawan untuk menggeser orientasi kerja dari rutinitas teknis menuju peran kultural yang transformatif dalam membangun ekosistem pengetahuan yang inklusif.

Kata kunci: kepustakawanan kultural, kepustakawanan struktural, transformasi perpustakaan, pustakawan, ruang publik pengetahuan.

Abstract

Changes in the information landscape resulting from digitalization, artificial intelligence, and the dynamics of a knowledge-based society require libraries to reposition their role from merely providing administrative services to becoming more participatory social institutions. This article aims to analyze the paradigm shift in librarianship from a structural approach toward a cultural approach in the context of library development in Indonesia. This study employs a qualitative approach using a conceptual review method through literature analysis of various theoretical works in librarianship and social sciences, particularly Lankes' ideas on new librarianship, Giddens' structuration theory, Foucault's institutional analysis, and Oldenburg's concept of the third place. The analysis is conducted through conceptual interpretation and theoretical synthesis to understand the relationship between the institutional structure of libraries and the social practices of librarians in facilitating knowledge production within society. The findings indicate that the dominance of a structural approach oriented toward administrative governance has the potential to limit the role of libraries in responding to the increasingly dynamic needs of society. In contrast, the paradigm of cultural librarianship offers a more relevant orientation by positioning libraries as public spaces that encourage knowledge dialogue, community participation, and the strengthening of critical literacy. This article concludes that the future of Indonesian librarianship depends on the ability of the librarian profession to shift its work orientation from technical routines toward a transformative cultural role in building an inclusive knowledge ecosystem.

Keywords: cultural librarianship, structural librarianship, library transformation, librarians, public knowledge space.

DOI:

© 2024 The Author(s). Published by (Institution). This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perpustakaan Indonesia menghadapi tantangan besar di era digital ketika peran tradisionalnya sebagai unit administratif dan penyimpan koleksi tidak lagi cukup untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin terhubung secara digital, karena perpustakaan kini dituntut untuk menjadi bagian dari ekosistem pengetahuan digital yang dinamis (Vitriana, 2024). Transformasi layanan perpustakaan menggeser fokus dari sekadar pengelolaan koleksi fisik ke layanan digital yang responsif, sehingga pustakawan dituntut untuk mengembangkan kompetensi digital, penguasaan teknologi informasi, dan kemampuan fasilitasi literasi informasi (Deriana et al., 2025). Hal ini menunjukkan perlunya perubahan paradigma kepastakawanan Indonesia dari pendekatan administratif semata menuju orientasi yang lebih kultural, inovatif, dan berorientasi pada pemberdayaan komunitas pengetahuan agar perpustakaan tetap relevan dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat berbasis informasi.

Perjalanan sejarah kepastakawanan Indonesia saat ini berada pada titik krusial. Transformasi digital, perkembangan kecerdasan buatan, percepatan produksi pengetahuan, dan dinamika komunitas informasi mengubah secara fundamental cara perpustakaan menjalankan fungsi sosial, edukatif, dan kulturalnya. Di tengah arus perubahan tersebut, perpustakaan tidak lagi dapat dipahami sekadar sebagai tempat menyimpan koleksi atau ruang fisik yang menyediakan layanan peminjaman buku, melainkan harus dipandang sebagai ruang interaksi pengetahuan dan ekosistem budaya yang memfasilitasi dialog, kolaborasi, dan pembelajaran sepanjang hayat. Perubahan lingkungan informasi ini mendorong perpustakaan untuk melakukan reposisi peran agar tetap relevan dalam ekosistem masyarakat yang semakin berbasis data dan konektivitas digital.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa banyak perpustakaan di Indonesia masih terjebak dalam tradisi administratif yang kaku dan menempatkan pengelolaan koleksi serta pemenuhan indikator akreditasi sebagai orientasi utama. Di saat yang sama, masyarakat bergerak dengan ritme baru: generasi digital mencari pengalaman belajar yang interaktif, kolaboratif, dan personal; komunitas kreatif membutuhkan ruang ekspresi dan produksi pengetahuan; dan publik menuntut akses informasi yang cepat, terbuka, serta bermakna. Ketimpangan antara tuntutan sosial yang dinamis dan pendekatan perpustakaan yang masih birokratis menimbulkan jurang yang semakin nyata antara perpustakaan dan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Fenomena rendahnya tingkat kunjungan perpustakaan, meningkatnya preferensi terhadap platform digital komersial, dan melemahnya hubungan perpustakaan dengan komunitas menjadi sinyal bahwa model lama tidak lagi memadai.

Dalam konteks tersebut, profesi pustakawan menghadapi dua orientasi peran yang kerap berseberangan: pustakawan struktural, yang berfokus pada

DOI:

© 2024 The Author(s). Published by (Institution). This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

kepatuhan prosedural dan stabilitas institusi, dan pustakawan kultural, yang menempatkan kreativitas, kolaborasi, dan pemberdayaan sosial sebagai pusat orientasi profesi. Inti profesi pustakawan bukan sekadar mengelola koleksi, tetapi memfasilitasi proses penciptaan pengetahuan dalam komunitas guna meningkatkan kualitas masyarakat (Lankes, 2011). Pernyataan tersebut menegaskan perlunya pergeseran paradigma dari orientasi teknis-administratif menuju peran kultural-transformasional yang secara aktif membangun masyarakat berpengetahuan. Dengan kata lain, masa depan perpustakaan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan untuk mengubah arah kepastakawanan: dari struktur yang menata menuju kultur yang menggerakkan; dari manajemen koleksi menuju penguatan kapasitas pengguna; serta dari rutinitas birokratis menuju kreativitas sosial yang mencerdaskan masyarakat (Lankes, 2011).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian konseptual (conceptual analysis) untuk menganalisis pergeseran paradigma kepastakawanan dari orientasi struktural menuju orientasi kultural. Metode ini bertumpu pada analisis literatur terhadap berbagai karya ilmiah yang relevan dalam bidang kepastakawanan, teori sosial, dan studi ruang publik. Literatur utama yang dianalisis mencakup karya-karya teoretis mengenai misi sosial perpustakaan, seperti gagasan Lankes tentang *new librarianship*, teori strukturasi dari Giddens, analisis kekuasaan institusional dari Foucault, serta konsep *third place* dari Oldenburg yang banyak digunakan dalam studi perpustakaan sebagai ruang publik. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi konsep-konsep tersebut dengan tema transformasi peran perpustakaan dalam masyarakat pengetahuan.

Proses analisis dilakukan melalui tahap identifikasi literatur kunci, interpretasi konseptual terhadap gagasan utama para penulis, serta sintesis teoretis untuk membangun kerangka analisis yang menjelaskan dinamika antara kepastakawanan struktural dan kepastakawanan kultural. Selain analisis literatur, tulisan ini juga memanfaatkan pendekatan reflektif yang mengaitkan kerangka teoretis dengan praktik kepastakawanan di Indonesia, sehingga memungkinkan pembacaan yang lebih kontekstual terhadap tantangan transformasi perpustakaan di era digital. Melalui pendekatan ini, artikel bertujuan merumuskan pemahaman konseptual mengenai perubahan orientasi profesi pustakawan dan implikasinya bagi masa depan kepastakawanan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kepustakawanan Struktural vs Kultural

DOI:

© 2024 The Author(s). Published by (Institution). This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Dalam konteks kepustakawanan struktural, pustakawan bekerja dalam kerangka organisasi birokratis yang menekankan kepatuhan pada standar, regulasi, sistem akreditasi, pengendalian layanan, dan tata kelola administratif. Paradigma ini penting sebagai fondasi keteraturan dan kontrol institusional. Dalam perspektif struktur kekuasaan modern, institusi dapat dipahami sebagai mekanisme kontrol sosial yang bekerja melalui aturan, pengawasan, dan disiplin yang terlembagakan (Foucault, 1977). Dalam kerangka ini, perpustakaan diposisikan sebagai institusi yang mengatur perilaku informasi masyarakat melalui seperangkat prosedur, standar layanan, regulasi akses, dan tata kelola administrasi yang ketat (Conzizca & Masruri, 2024). Sistem klasifikasi, aturan peminjaman, kebijakan keanggotaan, penilaian akreditasi, dan kontrol terhadap sumber informasi menjadi instrumen yang membentuk bagaimana pengguna dapat mengakses dan mengonsumsi pengetahuan. Pustakawan, dalam kerangka ini, tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan informasi, tetapi juga sebagai agen yang menjaga keberlangsungan sistem pengaturan institusional tersebut. Dengan demikian, perpustakaan dan pustakawan dapat dipahami sebagai subjek yang turut mengarahkan perilaku akses informasi masyarakat dalam batas-batas norma formal yang ditetapkan institusi.

Dengan logika tersebut, pustakawan struktural menjalankan peran yang melekat pada sistem birokrasi perpustakaan dengan memastikan ketertiban prosedural, kepatuhan terhadap standar regulatif, serta pengawasan terhadap penggunaan sumber daya informasi. Peran ini penting untuk menjaga tata kelola institusi, namun pada saat yang sama berpotensi menempatkan perpustakaan sebagai ruang yang kaku dan minim fleksibilitas sosial ketika struktur menjadi lebih dominan daripada tujuan kultural dan edukatifnya.

Dalam konteks ini, teori struktural memberikan kerangka analitis yang relevan untuk memahami relasi antara struktur dan tindakan individu. Struktur tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan dan sumber daya, tetapi juga sebagai ranah yang memungkinkan sekaligus membatasi tindakan sosial (Giddens, 1984). Struktur memiliki sifat dualitas: ia membentuk tindakan agen, tetapi pada saat yang sama diproduksi kembali melalui tindakan individu. Dengan demikian, pustakawan struktural beroperasi dalam logika tindakan yang sangat dipengaruhi oleh struktur birokrasi, namun sekaligus memperkuat dan mereproduksi struktur tersebut melalui praktik kerja sehari-hari.

Dalam konteks kepustakawanan, perspektif struktural membantu menjelaskan bahwa struktur organisasi perpustakaan—mulai dari standar layanan, aturan peminjaman, klasifikasi koleksi, mekanisme akreditasi, hingga hierarki jabatan—sesungguhnya tidak hanya merupakan sistem yang harus dipatuhi, tetapi juga terbentuk dan dipertahankan melalui praktik rutin pustakawan. Setiap prosedur teknis yang dilakukan pustakawan, seperti verifikasi data statistik layanan, pengolahan metadata, pengawasan aturan

DOI:

© 2024 The Author(s). Published by (Institution). This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

peminjaman, penyusunan SOP layanan, maupun proses pelaporan akreditasi, pada dasarnya merupakan tindakan yang terus mereproduksi struktur tersebut dalam realitas keseharian organisasi (Giddens, 1984).

Melalui perspektif ini, pustakawan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai objek yang tunduk pada struktur birokrasi perpustakaan, tetapi juga sebagai subjek yang melalui tindakan profesionalnya secara kolektif menyusun dan memelihara struktur tersebut. Ketika pustakawan menjalankan tugasnya secara rutin mengikuti standar institusi, ia sekaligus memperkuat legitimasi sistem pengaturan internal perpustakaan. Proses ini dapat dipahami sebagai reproduksi struktur melalui praktik sosial yang berulang (Giddens, 1984).

Namun demikian, dominasi pendekatan struktural yang tidak diimbangi dengan orientasi kultural dapat mereduksi perpustakaan menjadi entitas administratif yang statis dan kurang inovatif. Perpustakaan berpotensi kehilangan relevansi sosial ketika terlalu fokus pada tata kelola struktural tanpa memperhatikan kebutuhan publik yang dinamis (Montgomery & Miller, 2011). Dalam situasi seperti ini, menjadi penting untuk menggeser orientasi kepustakawanan menuju pendekatan yang lebih kultural dan humanistik, yang menempatkan perpustakaan bukan sekadar sebagai institusi layanan administratif, tetapi sebagai ruang sosial yang hidup dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

Berbeda dengan pendekatan struktural, kepustakawanan kultural memandang perpustakaan sebagai ruang budaya yang hidup, tempat masyarakat berdialog, belajar, dan membangun kreativitas intelektual. Dalam paradigma ini, perpustakaan tidak hanya berfungsi menyediakan akses terhadap informasi, tetapi juga menjadi arena produksi makna, tempat warga dapat mendiskusikan isu-isu publik, menegosiasi pengetahuan, dan menghasilkan gagasan-gagasan baru yang relevan dengan kebutuhan sosial dan kultural mereka. Pendekatan ini menempatkan pustakawan sebagai aktor yang berperan aktif dalam membangun hubungan dengan masyarakat, memahami konteks sosial pemustaka, serta mendorong terciptanya ruang partisipatif dan kolaboratif. Program berbasis komunitas seperti diskusi publik, lokakarya penulisan, ruang kreatif (makerspace), pemutaran film dan forum dialog, kelas literasi informasi, serta pameran pengetahuan lokal merupakan bentuk konkret dari praktik kepustakawanan kultural yang menegaskan bahwa perpustakaan dapat berfungsi sebagai ruang demokrasi pengetahuan.

Pendekatan ini juga menuntut pustakawan memiliki kompetensi pedagogis, komunikasi sosial, dan kemampuan reflektif, tidak hanya keterampilan teknis bibliografis. Kehadiran pustakawan sebagai figur intelektual yang memfasilitasi pemikiran kritis dan dialog sosial menjadikan perpustakaan relevan dalam membangun masyarakat yang berdaya dan melek informasi. Dengan demikian, perpustakaan berperan aktif dalam menciptakan ekosistem

DOI:

© 2024 The Author(s). Published by (Institution). This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

pengetahuan yang inklusif dan humanistik, bukan sekadar menjadi lembaga penyedia layanan administratif.

Perubahan paradigma kepastakawanan kultural juga dapat dipahami melalui konsep *third place*, yaitu ruang publik di luar rumah dan tempat kerja yang memungkinkan masyarakat membangun interaksi sosial, identitas komunitas, dan pengalaman bermakna (Oldenburg, 1999). Dalam perspektif ini, perpustakaan tidak lagi dipahami sekadar sebagai gedung atau koleksi, tetapi sebagai ekosistem budaya dan ruang tumbuhnya kreativitas intelektual. Pendekatan kultural mendorong pustakawan mengembangkan literasi kritis dan dialog publik, program berbasis komunitas, kolaborasi GLAM (Gallery–Library–Archive–Museum), serta pembelajaran berbasis pengalaman dan kreativitas digital. Dengan demikian, perpustakaan berfungsi sebagai arena produksi makna, bukan sekadar tempat penyimpanan informasi. Kekuatan perpustakaan tidak terletak semata pada koleksi yang dimiliki, tetapi pada kemampuannya menciptakan ruang publik yang demokratis dan mendorong partisipasi pengetahuan (Alstad & Curry, 2003).

Dalam perspektif teori strukturasi, pustakawan kultural dapat dipahami sebagai agen yang tidak hanya menggunakan struktur, tetapi juga mentransformasinya melalui tindakan reflektif dan kreatif. Melalui inovasi program, pemberdayaan pengetahuan, dan kolaborasi komunitas, pustakawan berpotensi menciptakan bentuk-bentuk struktur sosial baru yang lebih partisipatif dan humanistik dalam praktik kepastakawanan (Giddens, 1984).

2. Konfrontasi Paradigma dan Implikasinya bagi Masa Depan Kepustakawanan Indonesia

Ketegangan antara dua orientasi kepastakawanan ini merupakan refleksi dari pertanyaan mendasar: apakah perpustakaan Indonesia akan terus bergerak sebagai unit administratif formal yang berorientasi pada tata kelola dan kepatuhan prosedural, ataukah berevolusi menjadi ruang budaya yang dinamis dan berperan aktif dalam membangun peradaban pengetahuan? Pilihan arah ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan paradigma yang menentukan relevansi dan masa depan perpustakaan sebagai institusi sosial. Orientasi struktural mengedepankan stabilitas, kepastian, dan keteraturan yang penting dalam memastikan keberlangsungan operasional institusi; sementara orientasi kultural menempatkan kreativitas, partisipasi publik, dan transformasi pengetahuan sebagai pusat perhatian dalam menjawab tantangan masyarakat yang semakin kompleks dan plural.

Dalam konteks disrupsi digital dan perkembangan kecerdasan buatan, peran-peran struktural yang bersifat administratif dan rutin semakin mudah digantikan oleh mesin dan sistem otomatisasi. Teknologi mampu melakukan pengatalogan, analisis statistik, manajemen sirkulasi, dan berbagai proses teknis

DOI:

© 2024 The Author(s). Published by (Institution). This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

dengan kecepatan serta ketelitian yang melampaui kemampuan manusia. Dalam kondisi demikian, mempertahankan orientasi kepustakawanan yang semata-mata struktural berpotensi menempatkan profesi pustakawan pada posisi yang rentan terhadap obsolescence. Sebaliknya, fungsi-fungsi kultural yang menuntut empati, interaksi manusiawi, pemahaman konteks sosial, serta kemampuan memfasilitasi dialog pengetahuan menjadi semakin strategis dan tidak mudah tergantikan oleh teknologi (Janes, 2019). Oleh karena itu, reposisi peran pustakawan menuju wilayah pemberdayaan komunitas dan penguatan budaya literasi partisipatif menjadi semakin mendesak.

Dalam perspektif teori strukturasi, agen sosial memiliki kapasitas reflektif untuk memengaruhi dan mentransformasikan struktur melalui tindakan yang dilakukan secara berulang dalam praktik sosial (Giddens, 1984). Dalam konteks kepustakawanan, pustakawan tidak semata-mata berada di bawah kendali struktur birokrasi perpustakaan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengintervensi, memodifikasi, dan bahkan mentransformasi struktur tersebut melalui tindakan profesional yang inovatif. Paradigma kultural tidak meniadakan struktur, melainkan memandang struktur sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memungkinkan perubahan sosial. Melalui peran tersebut, pustakawan dapat menciptakan ruang baru dalam perpustakaan yang mendorong dialog, kolaborasi, serta pembentukan pengetahuan kolektif, suatu fungsi yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh sistem otomatisasi atau perangkat kecerdasan buatan (Giddens, 1984).

Dengan demikian, masa depan perpustakaan di Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan profesi pustakawan untuk menggeser orientasi epistemologis dan paradigma kerja dari sekadar kepatuhan teknis menuju peran kultural yang reflektif, kritis, dan transformatif. Identitas profesi tidak lagi cukup diukur dari penguasaan teknis bibliografis dan sistem administrasi, tetapi dari kontribusinya dalam memperkuat budaya literasi, membuka ruang dialog pengetahuan, memperkaya ekosistem intelektual lokal, serta meningkatkan kapasitas sosial masyarakat. Pendidikan dan pelatihan pustakawan perlu bergerak melampaui kompetensi teknis menuju model kurikulum yang mengintegrasikan kompetensi sosial, pedagogis, komunikasi publik, kolaborasi lintas sektor, serta kepemimpinan kultural, sehingga pustakawan mampu memainkan peran strategis sebagai penggerak transformasi perpustakaan dan agen perubahan sosial (Janes, 2019).

Apabila paradigma tersebut tidak diadopsi, kepustakawanan Indonesia berisiko terjebak dalam stagnasi birokratis yang menghambat relevansinya di tengah masyarakat modern. Sebaliknya, dengan keberanian mengembangkan paradigma kultural, perpustakaan berpotensi tumbuh sebagai institusi publik yang visioner, demokratis, dan inklusif, serta berperan aktif dalam membentuk masa depan masyarakat melalui penguatan pengetahuan dan literasi.

DOI:

© 2024 The Author(s). Published by (Institution). This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENUTUP

Pada akhirnya, masa depan kepustakawanan Indonesia akan ditentukan oleh keberanian profesi pustakawan dan pemangku kebijakan untuk memilih arah perubahan. Perpustakaan tidak akan pernah menjadi kekuatan peradaban jika ia hanya berdiri sebagai struktur administratif yang patuh pada prosedur, tetapi miskin imajinasi. Perpustakaan hanya akan menjadi sumber pengharapan ketika ia hidup sebagai ruang budaya, ruang dialog, dan ruang pemberdayaan pengetahuan bagi masyarakat. Transformasi ini tidak akan tercapai melalui retorika semata, tetapi melalui kebijakan konkret dan komitmen kolektif: memperkuat kurikulum pendidikan pustakawan berbasis kompetensi sosial dan pedagogis; membangun strategi nasional literasi kritis dan kolaborasi komunitas; mengintegrasikan perpustakaan dalam ekosistem budaya dan inovasi; serta mendorong reformasi kebijakan organisasi agar ruang kreatif dan partisipasi publik menjadi prioritas, bukan pelengkap. Perpustakaan perlu beralih dari paradigma *mengelola buku* ke *menggerakkan pengetahuan*, dan pustakawan harus bertransformasi dari *penjaga sistem* menjadi *pemimpin kultural* yang membangun masa depan intelektual bangsa.

Jika Indonesia sungguh ingin membangun masyarakat berpengetahuan dan demokratis, maka perpustakaan harus menjadi rumah bagi gagasan dan percakapan yang berani, bukan ruang sunyi yang terkungkung birokrasi. Saatnya kepustakawanan Indonesia menjemput masa depan, bukan dengan bertahan dalam struktur lama, tetapi dengan menciptakan struktur baru melalui tindakan reflektif, kreatif, dan transformatif. Di tangan pustakawan yang visioner, perpustakaan dapat menjadi jangkar peradaban, lentera pencerahan, dan jembatan menuju Indonesia yang lebih cerdas, inklusif, dan berdaya.

REFERENSI

- Alstad, C., & Curry, A. (2003). Public space, public discourse, and public libraries. *Library and Information Science Research E-Journal*.
- Conzizca, M. J., & Masruri, A. (2024). Peran perpustakaan sebagai media literasi digital masyarakat desa. *Jurnal Adabiya*, 26(2), 190–201.
- Deriana, D., Anwar, R. K., Amar, S. C. D., & Rukmana, E. N. (2025). Kompetensi pustakawan pada era digital. *IQRA: Jurnal Perpustakaan Dan Informasi*, 19(1), 25–43.
- Foucault, M. (1977). Discipline and punish: The birth of the prison, trans. Alan Sheridan (New York: Vintage, 1979), 227.
- Giddens, A. (1984). *The constitution of society: Outline of the theory of structuration*. Univ of California Press.
- Janes, J. (2019). *Library 2035: The Next Generation of Library Service*. Information Today, Inc.
- Lankes, R. D. (2011). *The atlas of new librarianship*. The MIT Press.

DOI:

© 2024 The Author(s). Published by (Institution). This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

- Montgomery, S. E., & Miller, J. (2011). The third place: The library as collaborative and community space in a time of fiscal restraint. *College & Undergraduate Libraries*, 18(2–3), 228–238.
- Oldenburg, R. (1999). *The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops, Bookstores, Bars, Hair Salons, and Other Hangouts at the Heart of a Community*. Marlowe & Company.
- Vitriana, N. (2024). Transformasi perpustakaan di era digital native. *Librarium: Library and Information Science Journal*, 1(1), 59–69.